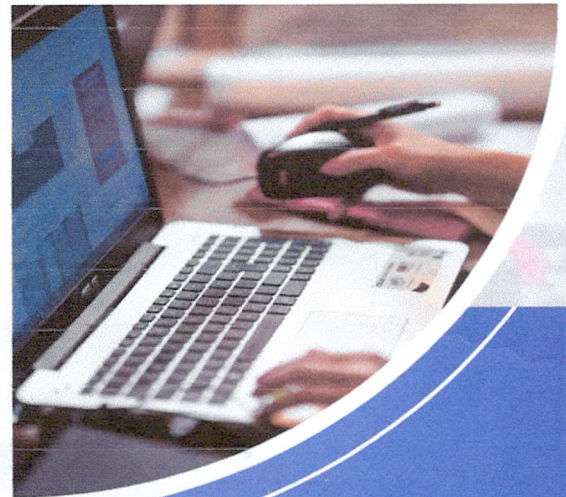




2026

MANAJEMEN RESIKO BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**



📍 Jl.Dahlia no.81 Samarinda 75121
🌐 bapperida.samarindakota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas RahmatNya sehingga Dokumen Manajemen Resiko Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2026 dapat tersusun sesuai pada waktunya. Dokumen Manajemen Resiko meminimalkan dampak negatif ; Mengurangi kerugian, kegagalan pelaksanaan Program , kegiatan dan sub kegiatan dan dampak negatif lainnya pada kinerja organisasi; Mengoptimalkan peluang ; mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Meningkatkan kualitas pelayanan ; Memastikan penyampaian layanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatkan Akuntabilitas; mendorong tata kelola yang baik (good govermen) dengan pengelolaan resiko yang transparan dan akuntabel yang mungkin terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak di capai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayan publik.

Dengan disusunnya Dokumen manajemen resiko ini, semoga menjadi acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan Perencanaan Penganggaran Daerah yang baik.

Samarinda 29 September 2025
Kepala Bapperida Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
 PERIODE RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 (Ranwal Renstra)

A.	URUSAN	:	
B.	Visi Pemda	:	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju --> (MAJU : Mandiri, Adil, berJaya, Unggul)
	Misi Pemda	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel
	Tujuan Strategis Pemda	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
C.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Pemda	:	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah Indikatornya : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk peningkatan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD / Sasaran Program (Eselon III/IV)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Sasaran Program 1.Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 Sasaran Program 2. Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan 92 % di tahun 2026 Sasaran Program 3 . Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk peningkatan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Sasaran Program Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
D.	Program Prioritas	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sasaran Program 1.Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 2. Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026)

		3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sasaran Program 3 . Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 Tahun 2026)
	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	: BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
	E. Penetapan konteks	:
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi

Mengetahui;
Wali Kota Samarinda,

H. Andi Harun

Samarinda, 29 September 2025
Kepala Bapperida
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS (ESELON II) - URUSAN PERENCANAAN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c		e	f	g	h	i	k	j
1	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			RSO.29.36.300.01					Perangkat Daerah
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja		Hasil Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Belum Memuaskan	RSO.29.36.300.02	Kepala Badan	a. Ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan jangka pendek (RKPD) yang mengakibatkan kinerja yang dihasilkan belum tergambarkan dengan baik. b. Sebagian besar rumusan kinerja, sasaran dan indikator baik pada level PEMDA maupun PD belum memenuhi kriteria kualitas yang baik. c. Meskipun secara umum pohon kinerja pada level Pemerintah Kota dan PD telah disusun, namun masih diperlukan penyempurnaan. d. Pemkot Samarinda telah menjabarkan rencana pencapaian realisasi kinerja kedalam rencana aksi, namun masih ditemui rencana aksi terfokus pada anggaran dan belum merincikan sampai ke tahap kegiatan.	Eksternal / Internal	1. Target Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Dari Bobot 30 hanya mendapat nilai 21,33 (LHE KemenPAN dan RB) 2. Target Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Dari Bobot 30 hanya mendapat nilai 17,23 (LHE KemenPAN dan RB)	Perangkat Daerah
3	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Nilai Inovasi Perangkat Daerah (Nilai 55 Tahun 2026)		Keberhasilan dan Keberlanjutan Inovasi Daerah Belum Maksimal	RSO.29.36.300.03	Kepala Badan	Tingkat kualitas bukti dukung terhadap inovasi daerah belum sepenuhnya maksimal sesuai Juknis BRIN	Eksternal / Internal	Terjadinya Penurunan nilai Indeks Inovasi Daerah dari Nilai 59,20 Pada Tahun 2023 menjadi 57,12 berdasarkan SK Mendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024	Masyarakat dan Perangkat Daerah

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan uraian akibat yang mengakibatkan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi* dan *Hukum*
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO

Risiko	H. Ananta Fathurozi, S.Sos, M.Si /Kaban		Hj. Susy Suknawati, ST, MT / Sekretaris		Imam Gunadi, S.STP /Kabid PPM		Syamsu Nur, SE, MM / Kabid Riset & Inovasi Daerah		Wahyuni Nadjar, ST, MT / Kabid PSIW		Nadya Turisna, S.STP, M.Si / Kabid P2EPD		Jumlah		Rata-rata		Skala Risiko Hit Map
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
	0												0	0	0,00	0,00	
	0												0	0	0,00	0,00	
Hasil Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Belum Memuaskan	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	24	18	4,00	3,00	17,00
Keberhasilan dan Keberlanjutan Inovasi Daerah Belum Maksimal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	24	6,00	4,00	19,00
	0												0	0	0,00	0,00	

Skala Probabilitas Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko Rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

3. Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Kemungkinan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, terdapat pemberitahuan	pelanggaran biasa, sanksi tidak
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	kegiatan terhambat, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi tidak

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
 PERIODE RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

A.	URUSAN PEMERINTAHAN	:	
B.	Visi Pemda	:	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju --> (MAJU : Mandiri, Adil, berJaya, Unggul)
	Misi Pemda	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan
	Tujuan Strategis Pemda	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
C.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Pemda	:	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah Indikatornya : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD / Sasaran Program (Eselon III/IV)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Sasaran Program 1.Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 Sasaran Program 2. Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan 92 % di tahun 2026 Sasaran Program 3 . Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Sasaran Program Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
D.	Program Prioritas	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sasaran Program 1.Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 2. Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026) 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sasaran Program 3 . Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi Sasaran Program Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 Tahun 2026)

E.	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	:	BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
	Penetapan konteks Risiko Strategis OPD	:	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya :
			1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026
			2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026
			1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			2. Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
			Program Riset Dan Inovasi

Mengetahui,
Kepala Bapperida
Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Sekretaris Bapperida
Kota Samarinda

Hj. Susy Sukmawati, S.T, MT.
NIP. 19691119 199603 2 002

Samarinda, 29 September 2025
Kepala Bidang PPM
Bapperida Kota Samarinda

Farida Agustini, S.T
NIP. 19740817 200003 2 007

Kepala Bidang PSIW
Bapperida Kota Samarinda

Wahyuni Nadjar, ST,M.T
NIP. 19780608 200604 2 031

Kepala Bidang P2EP
Bapperida Kota Samarinda

Narulita Haidinawati Ibay, ST, MT
NIP. 19700829 199604 2 001

Kepala Bidang RIDA
Bapperida Kota Samarinda

Hj. Mustika Retno Andrita, SE. M.Si
NIP. 19700328 198912 2 002

PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

PERIODE RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

A.	URUSAN	:	
B.	Visi Pemda	:	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju --> (MAJU : Mandiri, Adil, berJaya, Unggul)
	Misi Pemda	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang beintegritas dan akuntabel
	Tujuan Strategis Pemda	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
C.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Pemda	:	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah Indikatornya : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD / Sasaran Program (Eselon III/IV)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah (95% di Tahun 2026) Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sasaran Program 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK: 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik IK : . Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi Sasaran Program Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 % Tahun 2026)

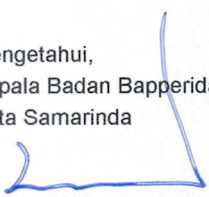
D. Kegiatan Prioritas

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu IK : Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026)	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sasaran Kegiatan Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Keterisian data perangkat daerah (100 % Tahun 2026)	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan IK : Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026)	
Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sasaran Program Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026)	
Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026)	
Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026)	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (8 Dokumen Tahun 2026)	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (8 Dokumen Tahun 2026)	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (4 Dokumen Tahun 2026)	
Program Riset Dan Inovasi	
Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 % Tahun 2026)	
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan IK : Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dapat langsung dimanfaatkan (19 Dokumen Tahun 2026)	
Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Inovasi dan Inovasi IK : Jumlah Laporan Inovasi dan Inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan (7 Laporan Tahun 2026)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026	

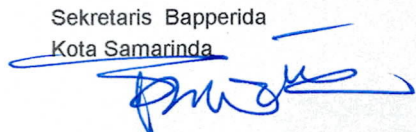
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (90% Tahun 2026) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (12 Laporan Tahun 2026) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Jumlah Laporan (5 Laporan Tahun 2026) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah IK : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang (12 Laporan Tahun 2026) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 Laporan Tahun 2026)
	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
	E. Penetapan konteks Risiko Strategis OPD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan IK : Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026)
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Keterisian data perangkat daerah (100 % Tahun 2026) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026)
		Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1. IK : Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) 2. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) 3. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026)
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (8 Dokumen Tahun 2026) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (8 Dokumen Tahun 2026)
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (4 Dokumen Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 % Tahun 2026)
		Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan IK : Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dapat langsung dimanfaatkan (19 Dokumen Tahun 2026) Kegiatan Invensi dan Inovasi IK : Jumlah Laporan Invensi dan Inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan (7 Laporan Tahun 2026)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
IK : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (90% Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (12 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IK : Jumlah Laporan (5 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IK : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang (12 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IK : Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 Laporan Tahun 2026)

Mengetahui,
Kepala Badan Bapperida
Kota Samarinda


H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

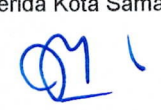
Sekretaris Bapperida
Kota Samarinda


Hj. Susy Sukmawati, S.T, MT.
NIP. 19691119 199603 2 002

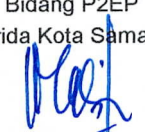
Samarinda, 29 September 2025
Kepala Bidang PPM
Bapperida Kota Samarinda


Farida Agustin, S.T
NIP. 19740817 200003 2 007

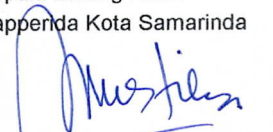
Kepala Bidang PSIW
Bapperida Kota Samarinda


Wahyuni Nadjari, ST,M.T
NIP. 19780608 200604 2 031

Kepala Bidang P2EP
Bapperida Kota Samarinda


Narulita Haidinawati Ibay, ST, MT
NIP. 19700829 199604 2 001

Kepala Bidang RIDA
Bapperida Kota Samarinda


Hj. Mustika Retno Andrita, SE. M.Si
NIP. 19700328 198912 2 002

Sasaran Kegiatan Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Keterisian data perangkat daerah (100 % Tahun 2026)
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan IK : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (80 Orang Tahun 2026)
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan IK : Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota IK : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terkendalnya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah IK : Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah (14 Kerjasama Tahun 2026)
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah IK : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (4 Laporan Tahun 2026)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Program Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : 1. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) 2. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) 3. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (8 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
PENETAPAN KONTEKS TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
 PERIODE RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

A.	URUSAN	:	
B.	Visi Pemda	:	Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju --> (MAJU : Mandiri, Adil, berJaya, Unggul)
	Misi Pemda	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel
	Tujuan Strategis Pemda	:	
C.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Pemda	:	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah Indikatornya : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD (Eselon II)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis OPD / Sasaran Program (Eselon III/IV)	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Keselarasan antar Dokumen Perencanaan IK : 1. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (91 % Tahun 2026) 2. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (92 % Tahun 2026) 3. Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (92 % Tahun 2026) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sasaran Program 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026 Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026) Program Riset Dan Inovasi Sasaran Program Meningkatkan Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 % Tahun 2026)
D.	Sub Kegiatan Prioritas	:	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sasaran Program Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah IK : Presentase capaian program pembangunan daerah 95 % di tahun 2026 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan IK : Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD IK : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (1 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain IK : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (2 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Konsultasi Publik IK : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (1 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah IK : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (4 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (1 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan IK : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (2.000 Usulan Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Sub Kegiatan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (2 Dokumen Tahun 2026) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (8 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah (4 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (1 Laporan Tahun 2026)
Program Riset Dan Inovasi
Sasaran Program Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan IK : Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah) (85,29 % Tahun 2026)
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan IK : Jumlah Dokumen Kelitbitan yang dapat langsung dimanfaatkan (19 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset IK : Jumlah naskah kebijakan berbasis (4 Naskah Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IK : Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (8 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IK : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan IK : Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (4 Pelahitan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah IK : Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (1 Dokumen Tahun 2026)
Kegiatan Inovasi dan Inovasi
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Inovasi dan Inovasi IK : Jumlah Laporan Inovasi dan Inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan (7 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator) (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (1 Laporan Tahun 2026)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah IK : 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 75 Tahun 2026 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 Tahun 2026
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (90% Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (12 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD IK : Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD IK : Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 Laporan Tahun 2026)

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IK : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Berita Acara Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (85 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapornya IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (5 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (150 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian IK : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi IK : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (5 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (112 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (20 Orang Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor IK : Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (2 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor IK : Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (13 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor IK : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran Kegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan IK : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu IK : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (10 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1500 Dokumen Tahun 2026)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Jumlah Laporan (5 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan IK : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan IK : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Mebel IK : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (44 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (3 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Aset Tak Berwujud IK : Jumlah pengadaan aset tak berwujud (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IK : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung (2 Unit Tahun 2026)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah IK : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (44 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya IK : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (204 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (2 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (7 Unit Tahun 2026)
KEMITRAAN
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Indikatornya : 1 : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 22, 50 di Tahun 2026 2 : Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Oleh KemenPan dan RB Menjadi 17, 70 di Tahun 2026
Kemitraannya Bappenas, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Seluruh Perangkat Daerah (Tenaga Ahli dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan)
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik Indikatornya : Indeks Inovasi Daerah (Nilai 61 Tahun 2026)
Kemitraannya Brin, Badan Litbang Provinsi Kaltim, Unmul, UMKT, Untag, Widya Gama, Poltek, LAN (Tenga Ahli Penelitian dan Koordinasi bidang Riset dan Inovasi)

Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
E. Penetapan konteks	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sasaran Kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan IK : Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD IK : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (1 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain IK : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (2 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Konsultasi Publik IK : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (1 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah IK : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (4 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (1 Berita Acara Tahun 2026) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan IK : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (2.000 Usulan Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Sub Kegiatan Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (2 Dokumen Tahun 2026) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan Tersedianya Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Keterisian data perangkat daerah (100 % Tahun 2026) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Sub Kegiatan Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (1 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Sasaran Sub Kegiatan Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan IK : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (80 Orang Tahun 2026) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan IK : Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu (100 % Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota IK : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan Tahun 2026) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Sasaran Sub Kegiatan Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah IK : Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah (14 Kerjasama Tahun 2026) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah IK : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (4 Laporan Tahun 2026) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (8 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2 Laporan Tahun 2026) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (2 Laporan Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (1 Laporan Tahun 2026) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan

Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (8 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (4 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sasaran Sub Kegiatan Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJMD dan RKPD) IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sasaran Sub Kegiatan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur IK : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan IK : Jumlah Dokumen Kelitbangan yang dapat langsung dimanfaatkan (19 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset

Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset IK : Jumlah naskah kebijakan berbasis (4 Naskah Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (8 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Sasaran Sub Kegiatan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IK : Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan IK : Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (4 Pelahitan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah IK : Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (1 Dokumen Tahun 2026)
Kegiatan Inovasi dan Inovasi
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Inovasi dan Inovasi IK : Jumlah Laporan Inovasi dan Inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan (7 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator) (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (1 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah IK : Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (1 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP (90% Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (12 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD IK : Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD IK : Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (3 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Laporan Tahun 2026)

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IK : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Berita Acara Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (85 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (5 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (150 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian IK : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi IK : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (5 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (112 Orang Tahun 2026)
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (20 Orang Tahun 2026)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah IK : Jumlah Laporan (4 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor IK : Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (2 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor IK : Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (13 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Logistik Kantor IK : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran Kegiatan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan IK : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (1 Dokumen Tahun 2026)
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu IK : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (10 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (1500 Dokumen Tahun 2026)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Jumlah Laporan (5 Laporan Tahun 2026)

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan IK : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan IK : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Mebel IK : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (44 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (3 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Aset Tak Berwujud IK : Jumlah pengadaan aset tak berwujud (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IK : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung (2 Unit Tahun 2026)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah IK : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (2 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2 Laporan Tahun 2026)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah IK : Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (12 Laporan Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (44 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sasaran Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (1 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya IK : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (204 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (2 Unit Tahun 2026)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (7 Unit Tahun 2026)

Mengetahui,
Kepala Badan Bapperida
Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

Sekretaris Bapperida
Kota Samarinda

Hj. Susy Sukmawati, S.T, MT.
NIP. 19691119 199603 2 002

Samarinda, 29 September 2025
Kepala Bidang PPM
Bapperida Kota Samarinda

Farida Agustini, S.T
NIP. 19740817 200003 2 007

Kepala Bidang PSIW
Bapperida Kota Samarinda

Wahyuni Nadjar, ST, MT
NIP. 19780608 200604 2 031

Kepala Bidang P2EP
Bapperida Kota Samarinda

Narulita Haidinawati Ibay, ST, MT
NIP. 19700829 199604 2 001

Kepala Bidang RIDA
Bapperida Kota Samarinda

Hj. Mustika Retno Andrita, SE, M.Si
NIP. 19700328 198912 2 002

No	Sasaran Operasional OPD	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			No	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase capaian program pembangunan daerah		1. Data Analisis dan Informasibidang perencanaan pembangunan daerah tidak valid 2. Daftar Evaluasi dan Laporan berkala belum Akuntabel	Kabid P2EPD	1. Proses pengumpulan data belum maksimal 2. Analisis Data tidak tepat 3. Produk data tidak mampu menyimpulkan data yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	Eksternal / Internal	C	Pencapaian program pembangunan daerah belum optimal	Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia		Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan	Kabid PPM	1. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah masih lemah 2. Kurang Pemahaman tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran yang bersumber pada SDM 3. Sistem informasi perencanaan terpusat yang mengalami kendala	Eksternal / Internal	C	Penerapan perencanaan kurang konsisten	Perangkat Daerah
		Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan		Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan	Kabid PSIW	1. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah masih lemah 2. Kurang Pemahaman tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran yang bersumber pada SDM 3. Sistem informasi perencanaan terpusat yang mengalami kendala	Eksternal / Internal	C	Penerapan perencanaan kurang konsisten	Perangkat Daerah
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah		Kurang bermanfaat dan tidak berkelanjutan inovasi karena tidak disusun berdasarkan kaidah dan aturan BRIN	Kabid RIDA	Kurangnya pendampingan dan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat terhadap syarat penyusunan inovasi dan pemanfaatan inovasi	Eksternal / Internal	C	Tidak tercapainya indeks inovasi daerah sebesar 61	Perangkat Daerah dan Masyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Kurang maksimalnya pelayanan publik di sekretariat sehingga kemungkinan proses pekerjaan berlangsung lama.	Sekretaris	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip pelayanan prima	Internal	C	Nilai Akip dan pelayanan publik nilai kepuasan (IKM) belum optimal	Perangkat Daerah

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom a diisi dengan nomor alat

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilihan risiko

Kalimat di atas tergolong Perilaku Risiko, perilaku yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko. Kalimat ini dapat dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom g diisi dengan penyebab risiko, untuk
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom H diisi dengan sumber risiko (eksternal/internat)

Kolom 1 diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO

Risiko	Hj. Susy Sukmawati, ST, MT / Sekretaris		Imam Gunadi, S.STP / Kabid PPM		Syamsu Nur, SE, MM / Kabid Riset & Inovasi Daerah		Nadya Turisna, S.STP, M.Si / Kabid P2EPD		Wahyuni Nadjar, ST, MT / Kabid PSIW		Jumlah		Rata-rata		Skala Risiko Hit Map
	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	
Data Analisis dan Informasi bidang perencanaan pembangunan daerah tidak valid	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	20	15	4,00	3,00	17,00
Daftar Evaluasi dan Laporan berkala belum Akuntabel	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	20	15	4,00	3,00	17,00
Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan Kurang bermanfaat dan tidak berkelanjutan inovasi karena tidak disusun berdasarkan kaidah dan aturan BRIN	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	20	15	4,00	3,00	17,00
Kurang maksimalnya pelayanan publik di sekretariat sehingga kemungkinan proses pekerjaan berlangsung lama	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	20	15	4,00	3,00	17,00

Kriteria Dampak

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% – 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kriteria Kemungkinan

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko				
		Kemungkinan sangat besar	Kemungkinan besar	Kemungkinan sedang	Kemungkinan kecil	Kemungkinan sangat kecil
Sangat Tinggi	5	Kemungkinan sangat besar	Kemungkinan besar	Kemungkinan sedang	Kemungkinan kecil	Kemungkinan sangat kecil
Tinggi	4	Kemungkinan besar	Kemungkinan sedang	Kemungkinan kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil
Sedang	3	Kemungkinan sedang	Kemungkinan kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil
Rendah	2	Kemungkinan kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil
Sangat Rendah	1	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil	Kemungkinan sangat kecil

Matriks Analisis Risiko		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5 Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4 Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3 Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2 Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1 Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Kota Samarinda Tahun Penilaian : 2026 Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Data Analisis dan Informatibidang perencanaan pembangunan daerah tidak valid 2. Daftar Evaluasi dan Laporan berkala belum Akuntabel	ROO. 26.36.300.01.1	Fasilitasi dan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala	Pendampingan dalam konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan Kota dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1. Melaksanakan Dalev Per triwulan 2. Melaksanakan forum perangkat daerah berupa konsultasi publik, asistensi, evaluasi, dan monitoring berkala per triwulan 3. Melaksanakan Forum data perencanaan	Kabid P2EPD	1 Tahun
2	Daftar Evaluasi dan Laporan berkala belum Akuntabel	ROO. 26.36.300.01.2	Fasilitasi dan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala	Pendampingan dalam konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan Kota dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1. Melaksanakan Dalev Per triwulan 2. Melaksanakan forum perangkat daerah berupa konsultasi publik, asistensi, evaluasi, dan monitoring berkala per triwulan 3. Melaksanakan Forum data perencanaan	Kabid P2EPD	1 Tahun
3	Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan	ROO. 26.36.300.01.3	Fasilitasi dan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala	Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Renstra dan Renja	Melaksanakan asistensi, koordinasi dan sinkronisasi secara berkala	Kabid PSIW dan PPM	1 Tahun
4	Kebermanfaatan dan Keberlanjutan Inovasi Daerah Belum Maksimal	RSO. 26.36.300.01.4	Fasilitasi dan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala	Pendampingan dalam penyusunan dokumen inovasi	Melaksanakan desk masalah dan inovasi perangkat daerah, melakukan kajian dan penelitian, lomba inovasi daerah	Kabid RIDA	1 Tahun
5	Kurang maksimalnya pelayanan publik di sekretariat sehingga kemungkinan proses pekerjaan berlangsung lama.	RSO. 26.36.300.01.5	1. Tersedianya SDM berkualitas 2. Tersedianya Sanpras Kantor	Kesesuaian anjab Bapperida dengan aturan Kemen PAN dan RB Penuhan kebutuhan barang dan perlengkapan alat kerja/ RKB	Melaksanakan Bimtek dan Diklat Teknis sesuai tupoksi Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 53 tahun 2023	Sekretaris	1 Tahun
			3. Tersedianya SOP dan Dok. Perencanaan PD	Tersedianya SOP dan Dok Perencanaan Digital	Penganggaran klasifikasi barang tak berwujud berupa sistem digital	Sekretaris	1 Tahun
			4. Tersedianya barang milik daerah	Tersedianya data kebutuhan kendaraan operasional, pemeliharaan barang	Penganggaran klasifikasi barang milik daerah	Sekretaris	1 Tahun

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

ROO adalah Rencana Operasional OPD

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Unit Pemilik Risiko : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
 Tahun : 2026
 Selera Risiko Pemilik Risiko : Selera Risiko Kota Samarinda dari 11-25

No	Pernyataan Risiko	Skor Nilai Residual Risk setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Level Risiko
a	b	c	d	e
Resiko Strategis				
1	Data Analisis dan Informasi bidang perencanaan pembangunan daerah tidak valid	2	3	11
2	Daftar Evaluasi dan Laporan berkala belum Akuntabel	2	3	11
3	Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan	2	3	11
4	Kurang bermanfaat dan tidak berkelanjutan inovasi karena tidak disusun berdasarkan kaidah dan aturan BRIN	3	3	14
5	Kurang maksimalnya pelayanan publik di sekretariat sehingga kemungkinan proses pekerjaan berlangsung lama	2	3	11

Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

(Risk Appetite
Pemerintah Kota
Samarinda)

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Pernyataan Risiko
 Kolom c diisi skor dampak
 Kolom d diisi dengan skor kemungkinan
 Kolom e Diisi dengan level risiko/skala risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitahuan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat Kecil	Kecil	Menengah	Besar	Sangat Besar
Tingkat Kemungkinan	5	Sangat Sering Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang Terjadi	1	3	5	8	20

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
Tahun : 2026

No	Pernyataan Risiko	Pernyataan Penyebab	Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian	Indikator Keluaran	Penanggungjawab	Target Waktu	Risiko yang Direspon		
								Kemungkinan	Dampak	Level Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Risiko Operasional OPD										
1	Data Analisis dan Informasi bidang perencanaan pembangunan daerah tidak valid	1. Proses pengumpulan data belum maksimal 2. Analisis Data tidak tepat 3. Produsen data tidak mampu menyiapkan data yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	Mitigasi	Meningkatkan koordinasi, pembinaan kepada produsen data dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian target secara berkala	Dokumen	Kabid P2EPD	1 Tahun	1	2	3 (sangat Rendah)
2	Daftar Evaluasi dan Laporan berkala tidak Akuntabel	1. Proses pengumpulan data belum maksimal 2. Analisis Data tidak tepat 3. Produsen data tidak mampu menyiapkan data yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	Mitigasi	Meningkatkan koordinasi, pembinaan kepada produsen data dan melakukan monitoring dan evaluasi capaian target secara berkala	Dokumen	Kabid P2EPD	1 Tahun	1	2	3 (sangat Rendah)
3	Kurang Konsistensi Dokumen Perencanaan	1. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah masih lemah 2. Kurang Pemahaman tentang Proses Perencanaan dan Penganggaran yang bersumber pada SDM 3. Sistem informasi perencanaan terpusat yang mengalami kendala	Mitigasi	Melaksanakan asistensi, koordinasi dan sinkronisasi secara berkala, untuk memperkuat pemahaman komitmen bersama dalam mengintegrasikan proses perencanaan agar lebih baik	Dokumen	Kabid PSIW, PPM	1 Tahun	1	2	3 (sangat Rendah)
4	Kurang bermanfaat dan tidak berkelanjutan inovasi karena tidak disusun berdasarkan kaidah dan aturan BRIN	Kurangnya pendampingan dan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat terhadap syarat penyusunan inovasi dan pemanfaatan inovasi	Mitigasi	Melaksanakan desk masalah dan inovasi perangkat daerah, melakukan kajian dan penelitian, lomba inovasi daerah	Dokumen	Kabid RIDA	1 Tahun	2	2	7 (Rendah)
5	Kurang maksimalnya pelayanan publik di sekretariat sehingga kemungkinan proses pekerjaan berlangsung lama	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip pelayanan prima	Mitigasi	1. Melaksanakan Bimtek dan Diklat Teknis sesuai tupoksi 2. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 53 tahun 2023 3. Penganggaran klasifikasi barang tak berwujud berupa sistem digital 4. Penganggaran klasifikasi barang milik daerah	Dokumen	Sekretaris	1 Tahun	1	2	3 (sangat Rendah)

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan pernyataan risiko
Kolom c diisi dengan respon risiko
Kolom d diisi dengan respon risiko
Kolom e diisi dengan rencana kegiatan pengendalian
Kolom f diisi dengan indikator keluaran (contoh Dokumen, SK, SOP dsb)
Kolom g diisi dengan Penanggung Jawab
Kolom h diisi dengan Target Waktu (Bulanan, Triwulan, Semester)
Kolom i diisi dengan Harapan Kemungkinan setelah ada Pengendalian / RTP
Kolom j diisi dengan Harapan Dampak setelah ada Pengendalian / RTP
Kolom k diisi dengan Harapan Level Risiko setelah ada Pengendalian / RTP

REGISTER RISIKO KECURANGAN
Register Risiko Kecurangan pada (sebutkan topik) di (objek penugasan)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Likelihood	Dampak	Skala		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12
Perencanaan											
1	Perencanaan	Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa	PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan dibawah 200juta yang bertujuan menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung	1. PPTK 2. PPK 3. KPA/PA	kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang	Reviu RKA oleh TAPD dan Setda Desk Sirup untuk pemakatan pekerjaan/ konsolidasi paket antara BPBJ dan OPD	2	3	11	Terjadinya Perbuatan Curang	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan
Pelaksanaan Kegiatan											
2	Pelaksanaan Kegiatan	Pengeluaran kegiatan tidak sesuai peraturan	Belanja barang dan jasa dipertanggung jawabkan tidak sesuai realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan	PPTK KPA/PA pihak Penyedia	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/ golongan	Verifikasi spj dilakukan berjenjang Penyerahan dokumen SPJ fisik	2	3	11	Terjadinya Perbuatan Curang	Mitigasi untuk mempertahankan kan kemungkinan
Pelaksanaan Kegiatan											
		Pembayaran tidak sesuai	1. Membuat bukti pengeluaran fiktif yang ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. PPTK; 2. Bendahara Pengeluaran 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/ golongan	Juknik Nomor :9001/ 073/HK-KS/2025 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggung jawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	2	3	11	Terjadinya Perbuatan Curang	Mitigasi untuk mempertahankan kan kemungkinan
3	Pertanggungjawab an/Pelaporan	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	Pelaksanaan setiap kegiatan didukung dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Namun dimungkinkan dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya formalitas.	1. PA 2. PPTK 3. Penyedia	Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/adminis- tratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan	1. Proses verifikasi berjenjang di PD 2. Laporan progress pekerjaan.	2	3	11	Terjadinya Perbuatan Curang	Mitigasi untuk mempertahankan kan kemungkinan

4	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kebutuhan	1. Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen 2. manipulasi spesifikasi kebutuhan barang sehingga sudah merujuk pada penyedia tertentu	PA, PPTK	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang an/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;	3	3	14	Terjadinya Perbuatan Curang	Mitigasi dengan mengurangi kemungkinan
---	---------------------------	--	--	----------	---	---	---	---	----	-----------------------------	--

Samarinda, 29 September 2025

Kepala Badan

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
NIP 1968120919880031004

Keterangan

- Kolom 1 : Nomor Urut
 Kolom 2 : Diisi dengan tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban/pelaporan, pengadaan barang dan jasa)
 Kolom 3 : Diisi dengan pernyataan risiko (mempertimbangkan referensi kamus risiko pada lampiran 2)
 Kolom 4 : Diisi dengan kemungkinan skenario terjadinya/dilakukannya kecurangan berdasar analisis proses bisnis dan dibahas bersama saat FGD
 Kolom 5 : Diisi dengan pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko berkenaan
 Kolom 6 : Diisi dengan kelemahan pengendalian yang mengakibatkan munculnya risiko tersebut. Identifikasi risiko dilakukan menggunakan Bow Tie Analysis dan Root Cause Analysis
 Kolom 7 : Diisi dengan pengendalian yang telah ada
 Kolom 8 : Diisi dengan nilai kemungkinan terjadi risiko dalam skala 1 sampai dengan 5.
 Kolom 9 : Diisi dengan nilai dampak jika suatu risiko benar-benar terjadi dalam skala 1 sampai dengan 5.
 Kolom 10 : Diisi dengan skala risiko yang merupakan hasil kali antara nilai likelihood dan nilai dampak
 Kolom 11 : Diisi dengan deskripsi dampak yang nilainya telah dinyatakan dalam kolom no 7.
 Kolom 12 : Diisi dengan rencana mitigasi/mengurangi risiko.

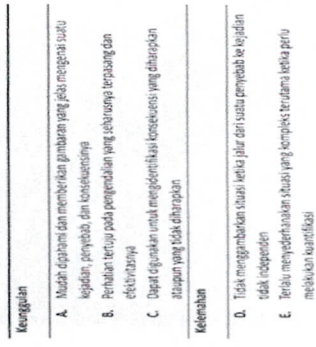
TEKNIK IDENTIFIKASI

PENYEBAB RISIKO FRAUD

Teknik untuk mengidentifikasi penyebab risiko fraud dapat dilakukan menggunakan Bow Tie Analysis dan Root Cause Analysis, sebagai berikut :

a. Bow Tie Analysis

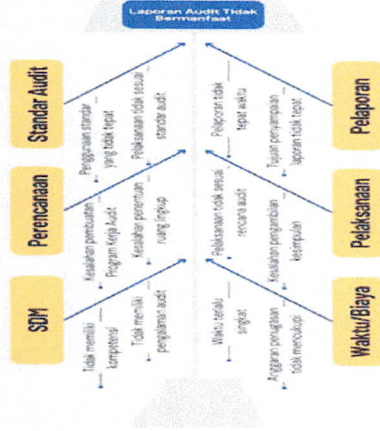
teknik yang merujuk pada suatu diagram berbentuk dasi kupu-kupu yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko yang dihadapi.



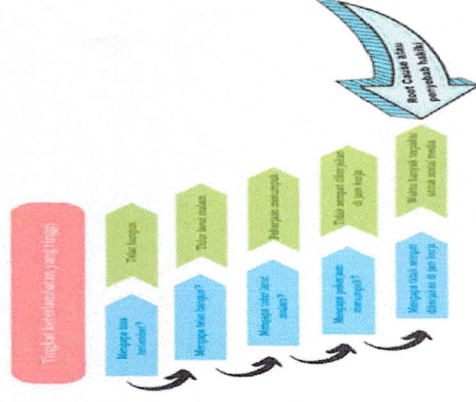
b. Root Cause Analysis (RCA)

Fishbone Diagram

Fishbone Diagram Laporan Audit Tidak Bermfaat



Five Whys Analysis Diagram



**RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Komponen : Identifikasi titik rawan Risiko

Waktu Money : 2026

(1) No (Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi kecurangan)	(2) Jenis Kegiatan Berpotensi (sebutkan jenis kegiatan di instansi Bapak/Ibu yang berpotensi terjadinya kecurangan)	(3) Potensi Terjadinya kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	(4) Skenario Kecurangan (uraikan kejadian terjadinya kecurangan)	(5) Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(6) Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU /Perda dll yang dapat meminimalisir potensi Kecurangan yang telah diidentifikasi)	(7)* Probabilitas potensi Kecurangan (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (3) benar- benar terjadi)	(8)** Dampak Kerugian (Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya Kecurangan pada kolom (3))	(9)*** Level Risiko (menggunakan matriks risiko)	(10) Rencana pengendalian yang perlu dilakukan
1	Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa	Nilai paket pengadaan pekerjaan mendekati 200juta	PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan dibawah 200j uta yang bertujuan menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung	kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang	Reviu RKA oleh TAPD dan Setda Desk Sirup untuk pemakatan pekerjaan/konsolidasi paket antara BPBJ dan OPD	2	3	11	1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta Integritas para pelaku pengadaan
2	Pengeluaran kegiatan tidak sesuai peraturan	Nilai SPJ sama dengan anggaran hingga titik koma	Belanja barang dan jasa dipertanggung jawabkan tidak sesuai realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/ golongan	Verifikasi SPJ dilakukan berjenjang	2	3	11	1. Melaksanakan Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasikan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ
	Pembayaran tidak sesuai	1. Kurang lengkapnya bukti bukti 2. Tidak adanya pengesahan bukti pembayaran 3. Memalsukan bukti yang ditagihkan ke unit kerja 4. dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	1. Membuat bukti pengeluaran fiktif yang ditagihkan kepada unit kerja 2. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah tanggal bukti yang sudah pernah ditagihkan ke unit kerja 3. Memalsukan bukti yang dijadikan dasar tagihan dengan cara mengubah jumlah tagihan.	Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/ golongan	Juknik Nomor :9001/073/HK-KS/2025 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggung jawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	2	3	11	1. Melaksanakan Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasikan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ

3	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	Pengujian pertanggung jawaban baru sebagai pertanggung jawaban formal/administratif sedang dilakukan	Pelaksanaan setiap kegiatan didukung dokumen pertanggung jawaban kegiatan. Namun dimungkinkan dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya formalitas.	Pengujian pertanggung jawaban baru sebagai pertanggung jawaban formal/administratif sedang dilakukan pengujian substansi belum dilakukan	1. Proses verifikasi berjenjang di PD 2. Laporan progress pekerjaan.	2	3	11	1. Pelaksanaan Pengadministrasian harus sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran secara tertib 2. Fungsi verifikasi berjenjang harus untuk menghindari ketidaksesuaian administrasi
4	Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kebutuhan	1. Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja. 2. spesifikasi barangnya khusus sehingga tidak semua penyedia bisa memenuhi.	1. Barang yang diusulkan sebenarnya tidak dibutuhkan namun diusulkan pengadaannya karena menguntungkan secara pribadi dan atau golongan. Sedangkan usulan yang dibuat hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen 2. manipulasi spesifikasi kebutuhan barang sehingga sudah merujuk pada penyedia tertentu	1. Lemahnya peran pengawasan internal dalam perencanaan pengadaan 2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pegawai terhadap pengendalian kecurangan belum optimal	Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;	2	3	11	1. Jenis Barang yang diusulkan berulang, jumlahnya cukup banyak dan pengadaannya dilakukan pada penyedia barang tertentu saja. 2. spesifikasi barangnya khusus sehingga tidak semua penyedia bisa memenuhi.

KEPALA BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 29 September 2025

H. Ananta Fathurrozi, S. Sos. M.Si
NIP 1968120919880031004

MITIGASI KECURANGAN

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Instansi : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap

Komponen

Waktu Money : 2026

No Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
1	Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa	1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta Integritas para pelaku pengadaan	PA	1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Membuat Pakta Integritas para pelaku pengadaan	90	2	2	7	Sudah Di bawah Setelah Resiko
2	Pengeluaran kegiatan tidak sesuai peraturan	1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	PA dan PPK	1. Melaksanakan Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasikan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	90	2	2	7	Sudah Di bawah Setelah Resiko
	Pembayaran tidak sesuai	1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	PA dan PPK	1. Melaksanakan Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. optimalisasikan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ	90	2	2	7	Sudah Di bawah Setelah Resiko
3	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang	PA dan PPK	1. Pelaksanaan Pengadministrasi harus sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran secara tertib 2. Fungsi verifikasi berjenjang harus untuk menghindari ketidaksesuaian administrasi	90	2	2	7	Sudah Di bawah Setelah Resiko
4	Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kebutuhan	1. Optimalisasi peran tim teknis dalam penyusunan HPS 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam pengadaan dan penyusunan HPS PBJ	PA dan PPK	1. Optimalisasikan peran tim teknis dalam penyusunan HPS 2. Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam pengadaan dan penyusunan HPS PBJ	85	2	2	7	Sudah Di bawah Setelah Resiko

KEPALA BAPPERIDA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 29 September 2025

2

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si
NIP 1968120919880031004